

**EFEKTIVITAS KERJA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI
DESA BAKARAN BATU KECAMATAN BATANG
KUIS KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

Oleh :

UMMI KALSUM SIREGAR

NPM 1303100006

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Administrasi Pembangunan**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2017**

SURAT PERNYATAAN

Bismittlahirrohmanirrohim

Dengan ini saya Ummi Kalsum Siregar NPM 1303100006, mengatakan dengan sungguh – sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh Undang – undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut Undang – undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak ada terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai – nilai ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, April 2017

Yang menyatakan

Umni Kalsum Siregar

ABSTRAK

EFEKTIVITAS KERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI DESA BAKARAN BATU KECAMATAN BATANG KUIS KABUPATEN DELI SERDANG

**UMMI KALSUM SIREGAR
NPM : 1303100006**

Pembangunan infrastruktur pedesaan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dalam rangka melaksanannya dibutuhkan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai hasil dari perwujudan demokrasi di dalam Pemerintahan Desa. BPD sebagai salah satu Penyelenggara Pemerintahan Desa yang berfungsi menetapkan peraturan bersama Pemerintahan Desa, mendengar, menyampaikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. BPD dan Pemerintahan Desa harus saling berkerja sama untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari pembangunan infrastruktur desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur desa serta kendala-kendala yang dihadapi BPD. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana lokasi penelitian adalah di Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang. Fokus dalam penelitian ini adalah efektivitas BPD dalam pembangunan infrastruktur desa. Data yang di kumpulkan untuk dianalisis adalah data primer, yaitu data yang bersumber langsung dari informan penelitian. Dalam hal ini yang menjadi informan penelitian adalah Kepala Desa Bakaran Batu, Kaur Pembangunan Desa Bakaran Batu, Ketua BPD Desa Bakaran Batu, Anggota BPD Desa Bakaran Batu, Tokoh Masyarakat. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Dalam penelitian ini yang telah dilakukan bahwa fungsi yang dilakukan oleh BPD Bakaran Batu masih sangat kurang maksimal dan bahkan dapat dikatakan tidak berpengaruh apa- apa dalam pemerintahan dan pembangunan, itu terlihat dari hasil wawancara dan hasil observasi lapangan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pasifnya anggota BPD dan kurang meratanya pembangunan infrastruktur desa.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Nikmat, Hidayah dan Karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang”**. Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara. Semoga Rahmat dan Karunia dari Allah STW selalu mengalir dan menyertai penulis dalam menyempurnakan karya ilmiah ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun dari segi bahasa yang digunakan karena masih terbatasnya kemampuan dan pengetahuan penulis, untuk itu berbagai saran dan kritik yang membangun dari para pembaca yang nantinya dapat berguna untuk menyempurnakan skripsi ini. Secara khusus penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyesusunan skripsi ini. Banyak semangat, motivasi , nasehat – nasehat , dan doa yang diberikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua orangtua penulis, Ayandah Rosul Siregar dan Ibunda Rosiana Harahap yang sangat besar jasa – jasanya. Terimakasih atas segala doa, nasihat kasih sayang, perhatian, motivasi maupun dukungan yang tak henti-hentinya. Maafkan atas segala kesalahan dan kekurangan anak kalian ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Drs. Tasrif syam M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara dan selaku Pembimbing I yang telah banyak memberi masukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Nalil Khairiah, S.IP. M.Pd. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika.,S.Sos. M.SP. selaku Sekrertaris Program Studi Ilmu Administrasi dan selaku Pebimbing II yang telah banyak memberi masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh staf pengajar, baik dosen maupun asistennya, staf pegawai di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Terima kasih kepada teman spesial Bayu Suhendra S.Kom dan abangku tersayang Zulfahmi Hasian Siregar yang telah banyak berjasa dalam proses penelitian.

8. Kepada Uwak Rosmala Dewi.S.H yang yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, arahan, dan motivasi selama ini.
9. Kepada orangtua angkat penulis Ibu Susanti dan Ibu Saripah yang selama ini sudah mendoakan dan memotivasi serta tidak bosan- bosannya memberikan nasihat.
10. Kepada teman – teman IAN Nurmaliah, Fitri wahyuni,Vani Apriliah, Rizky Ananda, Irma Yunita, Fazarnaaini, Afifah Matondang, Feris Maylanda dan Eci Damayanti.
11. Kepada teman – teman Nurhamidah, Purnama Rizky, Lia sari, Anggun Ariyani, Nitha Adiyanti dan Pinta Ito.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih telah membantu dan mendoakan saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Semoga Allah memberikan Rahmat dan Keridhoan-Nya kepada kita semua. Amin ya Rabbal ‘Alamin.

Medan, April 2017

Penulis

Ummi Kalsum Siregar
1303100006

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
D. Sitematika Penulisan.....	8
BAB II URAIAN TEORITIS..	9
A. Efektivitas	9
B. Efektivitas Kerja	11
1. Pengertian	11
2. Faktor – faktor yang mempengaruhi Efektivitas	13
C. Pengertian Desa	15
D. Kepemimpinan Kepala Desa	16
E. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	17
1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	17
2. Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	19
3. Fungsi Badan Permusyawaratan (BPD)	21
4. Hak Badan Permusyawaratan Desa	21
5. Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa	21
F. Pembangunan Desa	22

G. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	23
H. Pembangunan Infrastruktur	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Kerangka Konsep	29
C. Defenisi Konsep	30
D. Katagorisasi	32
E. Narasumber	33
F. Teknik Pengumpulan Data	35
G. Teknik Analisis Data	36
H. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
I. Gambaran Lokasi Penelitian	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Deskripsi Data Narasumber	44
B. Deskripsi Hasil Penelitian	47
C. Pembahasan Hasil Penelitian	56
D. Kendala – Kendala yang Ditemui BPD	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel III.1 Sarana dan Prasarana Desa	40
Tabel IV.1 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin	45
Tabel IV.2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan	45
Tabel IV.3 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jabatan	46

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar III.1 Kerangka Konsep	29
Gambar III.2 Struktur Desa Bakaran Batu	43

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran II : Daftar Wawancara
- Lampiran III : SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran IV : SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran V : SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran VI : SK-4 Undangan Seminar Proposal
- Lampiran VII : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran VIII : Surat Keterangan Penelitian dari Pemerintah Kabupaten Deli
Serdang Kecamatan Batang Kuis Desa Bakaran Batu
- Lampiran IX : SK -10 Surat Undangan Ujian Skripsi
- Lampiran X : Surat Bebas Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan unit terbawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia, namun desa memiliki peran dan fungsi yang penting dalam administrasi negara, bahkan secara sosial. Dalam sistem sosial kemasyarakatan Indonesia, desa merupakan bagian terpenting untuk pencapaian cita-cita dasar bernegara dan berbangsa, Dalam pengertian tersebut terkandung makna bahwasanya desa memiliki apa yang disebut sebagai hak otonomi, seperti yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar No.6 Tahun 2014 tentang desa yaitu hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah sesuai dengan asal-usul dan adat istiadat setempat.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dipimpin Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat. Desa memperoleh kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi.

Dengan hal itu diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik.

Pembangunan desa untuk rakyat desa merupakan kesepakatan yang sudah ada dalam perencanaan Pembangunan Nasional. dalam pasal 7 ayat 1 dan pasal 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dikatakan Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur pedesaan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, suatu hal yang penting untuk menunjang kegiatan ekonomi serta memaksimalkan segala aspek produktifitas di semua sektor, kemajuan suatu ekonomi berkorelasi dengan pembangunan infrastruktur. Dalam pembangunannya dibutuhkan kebijakan Pemerintahan Desa serta keikutsertaan dan dukungan masyarakat.

Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa terutama dalam infrastruktur merupakan suatu hal yang harus dan wajib, Oleh sebab itu dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu mengerakkan masyarakat untuk mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di bentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Masyarakat sebagai subjek sekaligus objek

pembangunan. Partisipasi masyarakat sangat di perlukan dalam pembangunan pedesaan dengan mengembangkan potensi kepercayaan dan kemampuan masyarakat itu sendiri. Masyarakat memiliki peran yang penting untuk menentukan pilihan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan yang dihendaki. Pada hakikatnya lembaga ini merupakan mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan institusi demokrasi perwakilan desa, BPD merupakan Badan Legislatif Desa, menurut Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 BPD merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa bersama Pemerintah Desa, BPD sebagai Lembaga Legislasi yang berfungsi mengayomi, mengawasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Seperti yang terkandung dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak untuk : a). Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; b). Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; c). Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Desa di Bagian Keenam, Pasal 54 (ayat 2), Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud meliputi: a) Penataan Desa; b) Perencanaan Desa; c) Kerja sama Desa;

d) Rencana investasi yang masuk ke Desa; e) Pembentukan BUM Desa; f) Penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan g) Kejadian luar biasa.

Dari hal tersebut terlihat betapa pentingnya kedudukan BPD untuk melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa, terutama dalam Pembangunan Infrastruktur Desa, Infrastruktur yang memadai merupakan suatu kebutuhan dari masyarakat Desa untuk membantu aktivitas masyarakat Desa. Dalam proses pembangunannya diperlukan kebijakan Pemerintah Desa dan peran serta dan dukungan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang diperlukan untuk membantu Pemerintahan Desa dibidang pembangunan dalam menyerap aspirasi masyarakat. Namun lain halnya di Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang yang menunjukkan indikasi bahwa efektivitas kerja lembaga Badan Permusyawaratan Desa Bakaran Batu terhadap pembangunan khususnya infrastruktur (*fisik desa*) yang ada di Desa Bakaran Batu nampaknya belum berjalan secara maksimal.

Desa Bakaran Batu merupakan sebuah desa yang terletak di kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatra Utara. Penduduk di desa ini terdapat beberapa suku yang dihuni oleh suku Jawa, Batak Mandailing, dan Melayu. Desa Bakaran Bakaran Batu terdiri dari beberapa Dusun, yaitu mulai dari Dusun I sampai dengan Dusun III.

Berdasarkan pengamatan awal dari informasi yang didapatkan oleh penulis bahwa Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bakaran Batu nampaknya masih belum terlihat. Hal ini terlihat dari tugas penyaluran aspirasi

masyarakat dari BPD yang diatur dalam Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 yang pada kenyataannya BPD di Desa Bakaran Batu belum berjalan maksimal karena masih ada sarana dan prasarana belum ada yang dibutuhkan masyarakat Desa Bakaran Batu. Pembangunan infrastruktur hanya berfokus pada perbaikan jalan. Kurangnya perhatian pada pembangunan infrastruktur lain, seperti halnya masih seringnya Desa Bakaran Batu banjir saat hujan karena dampak meluapnya sungai dikarenakan sungai yang dangkal, sehingga mengakibatkan banjir rumah masyarakat dan sekolah.

Secara normatif BPD adalah mitra sejajar dengan pemerintahan desa, namun seringkali dalam pelaksanaannya hubungan antara BPD dan pemerintahan desa tidak sejajar. Hubungan kerja BPD dan Kepala Desa di Bakaran Batu dalam proses-prosesnya tersebut menunjukkan adanya ketergantungan yang begitu besar dari Kepala Desa, BPD di Desa Bakaran Batu hanya berupa lembaga yang menyetujui, tidak menunjukkan kerjanya sebagai lembaga yang diperlukan untuk membantu pemerintahan desa dibidang pembangunan dalam hal menyerap aspirasi masyarakat. Seharusnya pembangunan infrastuktur pedesaan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan aspirasi masyarakat itu sendiri, tugas dan kerja yang dilakukan oleh BPD belum sesuai dengan aturan Perundang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 yang ditetapkan. Masih banyak masyarakat Desa Bakaran Batu yang tidak mengetahui apa sajakah yang telah dilakukan oleh BPD, bahkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa BPD itu sendiri.

Peran utama dari BPD yaitu mengayomi, legislasi, pengawasan dan menampung aspirasi masyarakat nampaknya belum berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Seharusnya sejalan dengan tugas dan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sangat berperan dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pembangunan desa serta pembinaan masyarakat desa. Dikarenakan hal tersebut penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah Efektivitas kerja Badan Permusyawaratan Desa dengan fokus terhadap pembangunan infrastruktur dengan judul penelitian sebagai berikut : **“EFEKTIVITAS KERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI DESA BAKARAN BATU KECAMATAN BATANG KUIS KABUPATEN DELI SERDANG”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian harus dirumuskan masalah dengan jelas agar penelitian dapat di laksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga akan jelas dari mana harus dimulai dan kemana harus pergi. Perumusan masalah juga diperlukan untuk mempermudah menginterpretasikan data dan fakta yang diperlukan dalam suatu penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Efektivitas Kerja BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Pembangunan Infrastuktur Desa di Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.

2. kendala – kendala apa saja yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. untuk mengetahui bagaimana efektivitas kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan infrastuktur desa di Desa Bakaran Batu kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.
- b. Untuk mengetahui apa saja kendala – kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.

2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai efektivitas kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) khususnya di Desa Bakaran Batu kecamatan batang kuis kabupaten deli serdang.
- b. Hasil penelitian dapat memberikan informasi pada desa lain khususnya dalam meningkatkan kualitas kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan proses pembangunan infrastuktur desa.
- c. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) di Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.

D. Sistematika Penulisan

BAB I : Berisikan Pendahuluan yang diuraikan Latar Belakang Masalah,

Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat serta Sistematika Penulisan.

BAB II : Berisikan Uraian Teoritis dan penguraian tentang Pengertian

Efektivitas, Efektivitas Kerja yang terdiri dari pengertian dan faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas, Pengertian Desa, Kepemimpinan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari pengertian BPD, tugas BPD, fungsi BPD, hak BPD dan kewajiban BPD, Pembangunan Desa, Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa dan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.

BAB III : Berisikan persiapan dan pelaksana penelitian yang diuraian

Tentang Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Kerangka Konsep Definisi Konsep, Katagorinisasi, Narasumber Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian, Gambaran Lokasi Penelitian,.

BAB IV : Berisikan Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan yang diperoleh penulis dari lapangan

BAB V : Penutup berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang telah diteliti.

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Efektivitas

Dalam suatu organisasi dapat diukur tingkat keberhasilannya dengan mengamati efektif tidaknya organisasi tersebut dalam menjalankan tugasnya. Kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik menurut Pasolong (2007 : 4) efektivitas berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas berarti tujuan yang telah di rencanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Siagian (2007 : 20) memberikan definisi efektivitas yaitu pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sarana yang telah ditetapkan. Jika hasil Kegiatan semakin mendekati sasaran berarti tingkat keefektivitasnya semakin tinggi.

Efektivitas kerja dikatakan tercapai apabila telah memenuhi kriteria empat hal diatas. Mulai dari dana, mutu, waktu dan tata cara yang dijalankan. Menurut Handoko (2003 : 07), efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing the righth things*). Maksudnya bukan bagaimana melakukan pekerjaan dengan benar, tetapi bagaimana menemukan pekerjaan yang benar untuk dilakukan dan memusatkan sumber daya dan usaha pada pekerjaan tersebut.

Menurut Kurniawan (2005 : 109) efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (*oprasi, kegiatan program, atau misi*) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang baik adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Sedangkan Menurut Sumaryandi (2005 : 105), efektivitas dalam organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang mewujudkan sejauh mana sasaran yang telah dicapai.

Menurut Tampubolon (2007 : 75) mengartikan efektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati secara bersama serta tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Sedangkan menurut Denison dalam Pabundu (2010 : 135) mengemukakan bahwa ada empat prinsip integratif mengenai efektivitas yang berhubungan dengan budaya organisasi dan kinerja organisasi. Keempat prinsip ini diberi nama empat sifat utama (*main cultural traits*) yang mencakup keterlibatan (*involvement*), konsistensi (*consistency*), adaptasi (*adaptability*), dan misi (*mission*).

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasional sesuai dengan yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang atau organisasi menghasilkan keluaran atau output sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan pengertian yang di paparkan diatas, ada 4 hal yang merupakan unsur – unsur efektivitas yaitu :

- a. Pencapaian tujuan, suatu kegiatan dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b. Ketepatan waktu, suatu kegiatan dikatakan efektif apabila penyelesaian atau tercapai tujuan sesuai atau bertepatan dengan waktu yang telah ditentukan
- c. Manfaat, suatu kegiatan dikatakan efektif apabila ini memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhan.
- d. Hasil yang diperoleh, adanya hasil dari program yang telah terlaksana sesuai dengan harapan masyarakat

B. Efektivitas Kerja

1. Pengertian

Menurut Komarudin (2000 : 126) efektivitas kerja adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan manajer, artinya manajemen yang efektif tidak selalu disertai efisiensi yang maksimum.

Siagian (2002 : 151) menyatakan efektivitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya yang telah ditetapkan. Artinya pelaksanaan suatu pekerjaan dinilai baik atau tidaknya sangat tergantung pada penyelesaian dan tidak terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakan dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu.

Siagian (2001 : 24) mendefinisikan efektivitas kerja adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan.

Anoraga (2000 : 178) mendefinisikan bahwa efektivitas kerja adalah berhubungan dengan pencapaian tujuan yang lebih dikaitkan dengan hasil kerja. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian hasil kerja yang maksimal dalam arti pencapaian dan target yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas.

Dari pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas kerja adalah tingkat keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuan dengan ketetapan waktu yang telah di tentukan tersedianya sarana dan prasarana untuk mencapai suatu hasil yang maksimal.

Martoyo (2002 : 4) mendefinisikan efektivitas kerja adalah sebagai suatu kondisi atau keadaan dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana dan peralatan yang digunakan, disertai dengan kemampuan yang dimiliki, adalah tepat sehingga tujuan yang dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. efektivitas selalu dikaitkan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai.

Sutarto (2008 : 95) efektivitas kerja suatu keadaan dimana aktivitas – aktivitas jasmaniah dan rohaniah dilakukan oleh manusia untuk mencapai hasil atau akibat sesuai dengan yang di kehendaki.

Menurut Gie (2000 : 86) mengemukakan memberikan batasan- batasan tentang efektivitas kerja sebagai berikut : suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki ketika seorang melakukan perbuatan (*kerja*) dalam maksud dan tujuan tertentu yang memang dikehendakinya maka perbuatan orang tersebut dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mencapai maksud sebagai yang dikehendaki.

Hasibuan (2005 : 63) mendefinisikan efektivitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah di tentukan. Artinya apakah pelaksanaan suatu dinilai baik atau tidak atau tidak tergantung apabila tugas diselesaikan, bagaimana cara melaksanakan dan berapa biaya yang dikeluarkan.

Dari pendapat beberapa para ahli diatas dapat di simpulkan efektivitas kerja menunjukkan usaha atau rangkaian pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Suatu usaha dapat dikatakan efektif apabila usaha tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh organisasi itu sendiri, namun demikian suatu organisasi tujuan yang ditujukan akan lebih efektif bila di sertai dengan rencana yang matang dan didukung oleh sarana dan prasarana yang ada dan sekaligus mempunyai tindakan yang efektif dan mencapai hasil yang maksimal.

2. Faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja

Untuk terwujudnya kerja yang efektif ada bebrpa faktor yang mempengaruhinya menurut Steers (2005 : 11) mendifinisikan 4 faktor yang mempengaruhi efektivitas kerjayaitu karakteristik organisasi, karakteristik

lingkungan, karakteristik pekerjaan dan karakteristik kebijakan manajemen. :

1) Karakteristik organisasi mempengaruhi efektivitas kerja karena karakteristik organisasi ini menggambarkan struktur yang harus dilakukan oleh karyawan dalam melakukan pekerjaannya struktur organisasi merupakan cara untuk menempatkan manusia sebagai bagian dari pada suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola – pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas ; 2) karakteristik lingkungan ini secara keseluruhan berada dalam lingkungan organisasi seperti peralatan, perlengkapan, hubungan diantara pegawai dan kondisi kerja. Ciri lingkungan ini selalu mengalami perubahan artinya memiliki sifat ketidakpastian karena selalu terjadi proses dinamisasi ; 3) karakteristik pekerja faktor inilah yang paling berpengaruh terhadap efektivitas kerja, karena betapapun lengkapnya sarana dan prasarana, betapapun baiknya mekanisme kerja karena tanpa dukungan kualitas sumber daya yang mengisinya tidak akan ada artinya ;4) karakteristik kebijaksanaan praktek manajemen, praktek manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang dalam mengkondisikan semua hal ada didalam organisasi kebijakan dan praktek manajemen ini harus memperhatikan juga unsur manusia sebagai individu yang memiliki perbedaan bukan hanya mementingkan strategi mekanisme kerja sama. Mekanisme kerja ini meliputi penetapan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan sumberdaya dan menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi dan kepemimpinan dan pengambilan keputusan yang bijaksana, adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan inovasi organisasi.

C. Pengertian Desa

Menurut Yayuk (2002 : 10), Desa berasal dari bahasa India swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas.

Menurut Nurchollis (2011 : 81) desa dan pedesaan sering dihubungkan dengan pengertian rural dan village yang dibandingkan dengan kota (*city/town*) dan perkotaan (*urban*). Konsep pedesaan dan perkotaan mengacu pada karakteristik masyarakat sedangkan desa dan kota mengacu pada satuan wilayah administrasi atau tetorial, dalam hal ini desa mengacu pada beberapa desa.

Sedangkan menurut Saragi (2004 : 315) mendefinisikan bahwasanya desa sebagai setiap permukiman para petani, pengertian desa terdapat tiga aspek yaitu (1) analisis statistik, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan dengan penduduk kurang dari 2500 orang, (2) analisis sosial Psikologis, desa merupakan suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan akrab dan bersifat informal diantara sesama warganya, dan yang ke (3) analisis ekonomi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan dengan penduduknya tergantung kepada pertanian. Di Indonesia penggunaan istilah tersebut digunakan dengan cara yang berbeda dikarenakan perbedaan adat ataupun bahasa tiap daerah, seperti dusun bagi masyarakat Sumatera Selatan, dati di Maluku, kuta untuk Batak, nagari di Sumatera Barat dan manua di Minahasa.

Berdasarkan pengertian diatas, maka disimpulkan bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang dibangun berdasarkan sejarah, nilai-nilai, budaya,

hukum dan keistimewaan tertentu yang diakui dalam sistem kenegaraan kesatuan Republik Indonesia yang memiliki wewenang untuk mengatur, mengorganisir dan menetapkan kebutuhan masyarakatnya secara mandiri.

D. Kepemimpinan Kepala Desa

Kepala desa bukan sekadar Pemerintahan Desa, bukan sekadar Pemerintah Desa, dan bukan sekadar Kepala Desa. Namun Kepala Desa menempati posisi paling penting dalam kehidupan Desa. Menurut Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 adalah menempatkan Kepala Desa bukan sebagai kepanjangan tangan pemerintah, melainkan sebagai pemimpin masyarakat. Artinya Kepala Desa harus mengakar dekat dengan masyarakat, sekaligus melindungi, mengayomi dan melayani warga masyarakat.

Kepala desa atau pemerintahan desa di dalam PP (Peraturan Pemerintah) No. 72 tahun 2005 tentang Kepala Desa pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan istirahat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

E. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan desa (BPD) merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan karena ada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan di peroleh dari proses yang baik. Melalui, musyawarah untuk mufakat berbagai konflik antara para elit politik dapat segera di selesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan – goncangan yang merugikan masyarakat luas.

Dalam Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dikatakan Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana demokrasi yang dimaksud adalah bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya. Dalam pemerintahan desa BPD dapat dianggap sebagai “parlemen-nya” desa karena memiliki peran sebagai pembuat dan pengesahan peraturan desa. BPD

mempunyai kedudukan sejajar dengan pemerintah desa (kepala desa) dengan kata lain BPD dan pemerintah desa merupakan mitra yang berkerja sama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja Kepala Desa dalam Undang – Undang Tentang Desa pasal 55. Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang bersal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat. Dalam melaksanakan perannya sebagai sarana yang melancarkan keputusan kolektif di desa maka BPD yang merupakan wakil dari masyarakat desa tersebut, harus menjembatani antara masyarakat dengan pemerintahan desa minimal dengan adanya kesamaan pendapat dalam menentukan keputusan-keputusan kolektif di desa dan apabila tidak dijembatani maka setidaknya BPD mampu menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintahan desa agar nantinya setiap keputusan - keputusan yang diambil merupakan kesepakatan bersama dan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat.

Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing – masing unsur pemerintahan desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antara BPD dengan pemerintah desa harus di dasari pada filosofi anantara lain (Wasistiono 2006:36) :

- a. Adanya kedudukan sejajar diantara yang bermitra.
- b. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai.
- c. Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan.
- d. Adanya prinsip saling menghormati.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Kemudian dalam pasal 56 ayat 1 disebutkan bahwa anggota Bdan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari pendudu desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

2. Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. BPD berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarkat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Atas fungsi tersebut, BPD mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan musyawarah desa yang diikuti oleh Kepala Desa, BPD, serta unsur dari perwakilan masyarakat desa untuk memutuskan hal – hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan desa, yaitu : penataan Desa, perencanaan Desa, kerja sama Desa, rencana

investasi yang masuk ke desa membentuk BUM Desa, Aset Desa, dan kejadian luar biasa.

- b. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa dalam musyawarah desa yang diikuti oleh unsur masyarakat desa.
- c. Menerima laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap tahun anggaran dari kepala desa dalam rangka melakukan pengawasan kinerja pemerintahan desa.
- d. Memberikan secara tertulis kepada Kepala Desa tentang masa jabatan yang akan berakhir yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir.
- e. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang akan melaksanakan tugas pemilihan Kepala Desa mulai dari persiapan hingga penepatan.
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada pejabat Bupati/ walikota.
- g. Menggali, menampung , menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- h. Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

3. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Dilihat dari pasal 55 Undang – undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

4. Hak dan Badan Permusyawaratan Desa

Dilihat dari pasal 61 Undang – undang No. 6 Tahun 2014 tentang hak dan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa.
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

5. Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa

Dilihat dari pasal 63 Undang undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Badan Bermusyawaratan desa berkewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika,

- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa,
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan,
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

F. Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan pembangunan nasional, pembangunan desa memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan ekonomi, politik, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan. Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Sedangkan pemerintah memberikan bimbingan, bantuan, pembinaan, dan pengawasan. Menurut Kartasmita (2001 : 66) mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan.

Suparno (2001 : 46) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan

selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. Sedangkan menurut Ahmadi (2001 :222) mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak.

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa adalah pembangunan yang dilakukan secara sadar dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat dan pemerintahan Desa sebagai pelaksana pembangunan sesuai dengan kemampuan. Pembangunan di Desa menjadi tanggung jawab Kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) PP No 72 Tahun 2005 ditegaskan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum Musrenbangdes, hasil musyawarah tersebut ditetapkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Desa) selanjutnya ditetapkan dalam APBDesa. Dalam pelaksanaan pembangunan Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh BPD.

G. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan

yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

Menurut Suryono (2001 : 124) partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Supriady (2005 : 16) diartikan sebagai ikut serta masyarakat yang efektif membutuhkan kesiapan dari partisipasi masyarakat. Partisipasi dalam menerima hasil pembangunan dan menilai hasil partisipasi masyarakat. Sedangkan menurut Isbandi (2007:27) partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan ketertiban masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Dari defenisi diatas maka disimpulkan bahwa jelas keikutsertaan masyarakat dalam proses penentuan pembangunan di desa adalah sangat dominan. Melibatkan mental dan emosi masyarakat desa yang dapat mendorong mereka untuk menyumbang bagi tercapainya tujuan masyarakat, merencanakan dan mengerjakan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Usaha pemberdayaan masyarakat, dalam arti pengelolaan pembangunan desa harus dibangun dengan berorientasi pada potensi viskal, keterlibatan masyarakat serta adanya usaha yang mengarah pada kemandirian masyarakat desa. Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara aktif baik pada pembuatan rencana pelaksanaan maupun penilaian pembangunan menjadi penting sebagai tolak ukur kemampuan masyarakat untuk berinisiatif dan menikmati hasil pembangunan yang telah dilakukan. Dalam meningkatkan dan mendorong munculnya sikap partisipasi, maka yang perlu dipahami oleh pengembang masyarakat adalah kebutuhan-kebutuhan nyata yang dirasakan oleh individu maupun masyarakat.

H. Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur dapat berupa fisik dan sosial dapat diartikan sebagian kebutuhan dasar suatu wilayah perorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang sangat diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik dan lancar

Infrastruktur pedesaan didefinisikan sebagai infrastruktur yang bersifat fisik dan memberikan akses terhadap pelayanan dasar maupun pelayanan sosial serta ekonomi bagi masyarakat pedesaan. Pembangunan Infrastruktur ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di Desa, dengan terbangunnya infrastruktur pedesaan memudahkan akses pelayanan dasar dan pelayanan sosial. Menurut Kodoatie(2003:26) mendefinisikan infrastruktur sebagai fasilitas-

fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Singkatnya infrastruktur adalah sekumpulan fasilitas yang sengaja disediakan untuk mendukung aktivitas masyarakat. Dalam sudut pandang Islam, infrastruktur merupakan suatu media untuk menegakkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat (*sharia compliance*).

Dalam memilih jenis infrastruktur yang akan dilaksanakan di desa sasaran harus mempertimbangkan faktor-faktor, antara lain:

- a. Memenuhi kebutuhan infrastruktur yang mendesak bagi masyarakat miskin dan diusulkan oleh masyarakat melalui musyawarah desa.
- b. Langsung memberikan manfaat bagi masyarakat setempat terutama kelompok miskin,
- c. Penyediaan lahan untuk infrastruktur disediakan oleh masyarakat.
- d. dilaksanakan dan berfungsi pada tahun anggaran.
- e. Memprioritaskan pemberian kesempatan kerja kepada tenaga kerja setempat dan penggunaan material lokal.
- f. Penggunaan teknologi sederhana yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat atau teknologi yang sesuai dengan kebutuhan setempat.
- g. Merupakan infrastruktur yang dapat dikelola oleh masyarakat.
- h. Menjamin keberlangsungan fungsi infrastruktur yang dibangun.
- i. Tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, sosial dan budaya.

Menurut Kodoatie (2003:101), mengatakan pula bahwasanya infrastruktur juga dapat dikelompokkan menjadi 13 kategori yakni, :

- a. Sistem penyediaan air: waduk, penampungan air, transmisi dan distribusi, fasilitas pengelolaan air (*treatment plant*).
- b. Sistem pengelolaan air limbah: pengumpulan, pengolahan, pembuangan, daur ulang.
- c. Fasilitas pengelolaan limbah padat.
- d. Fasilitas pengendali banjir, berupa drainase dan irigasi.
- e. Fasilitas lintas air dan navigasi.
- f. Fasilitas transportasi: jalan, rel, bandar udara. Termasuk didalamnya adalah fasilitas tanda-tanda lalu lintas, fasilitas pengontrol.
- g. Sistem transit publik.
- h. Sistem kelistrikan: produksi dan distribusi.
- i. Fasilitas gas alam.
- j. Gedung publik: sekolah, rumah sakit.
- k. Fasilitas perumahan publik.
- l. Taman kota sebagai daerah resapan, tempat bermain termasuk stadion.
- m. Komunikasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

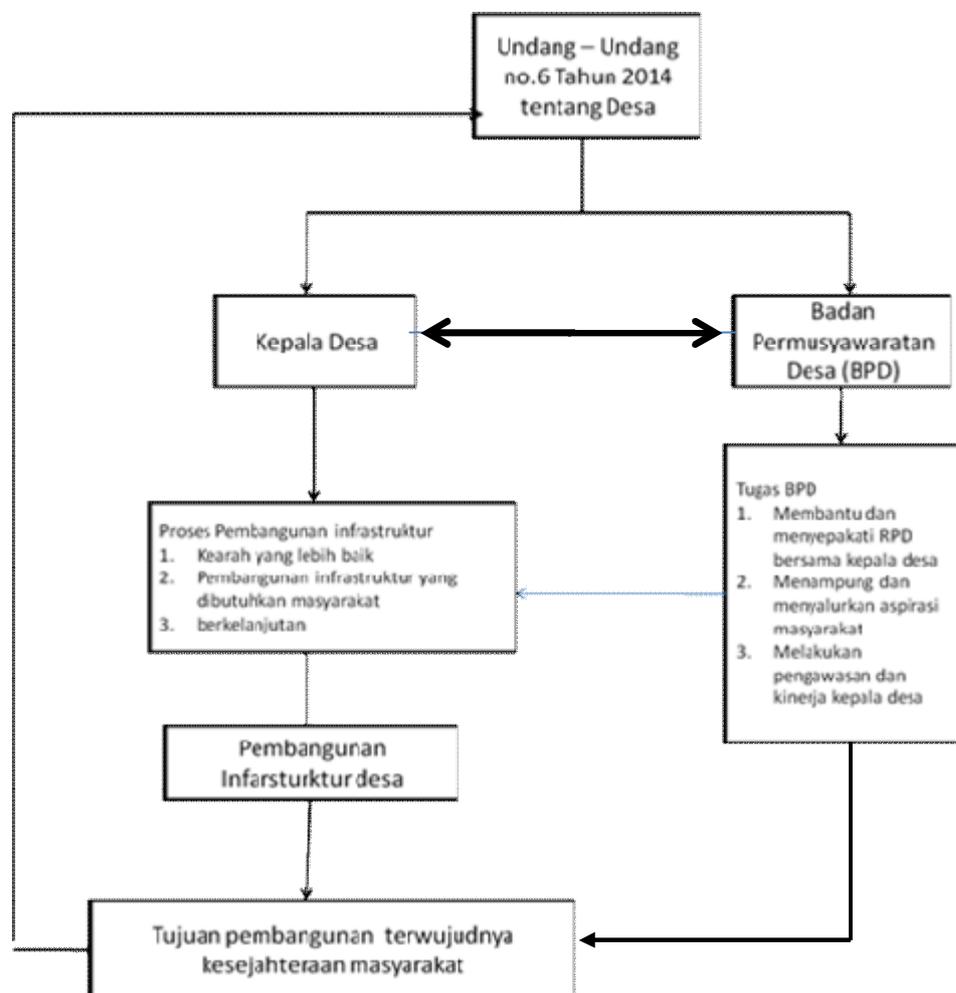
A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan metode penelitian, terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Arikunto (2010 : 03), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk menganalisis digunakan analisis data kualitatif yang prosedur pemecahan masalah yang diselediki dengan pengamatan, wawancara, dan menggambarkan keadaan objek peneliti pada saat sekarang berdasarkan fakta – fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya. Menurut Moleong (2010 : 05), penelitian kualitatif memanfaatkan wawancara untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.

B. Kerangka Konsep

Menurut Kusmayadi dan Sugiarto (2000 : 49) kerangka konsep merupakan hasil identifikasi yang sistematis dan analisis yang kritis dari peneliti berdasarkan kajian kepustakaan dan pengamatan awal. Maka konsep yang dapat digambarkan akan disusun dalam model teoritis sebagai berikut :



Gambar III.1 Kerangka Konsep

C. Defenisi Konsep

Konsep sebagai ide dan gambaran tentang hal-hal atau benda-benda, gejala sosial yang dinyatakan dalam istilah. Konsep dalam penelitian ini adalah :

- a. Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dicapai, semakin efektif pula kegiatan. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan – tujuan yang ditentukan dan sesuai dengan sasarannya, untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang telah dijalankan.
- b. Efektivitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah di tentukan. Artinya apakah pelaksanaan suatu dinilai baik atau tidak atau tidak tergantung apabila tugas diselesaikan, bagaimana cara melaksanakan dan berapa biaya yang dikeluarkan.
- c. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dari suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya. memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena kerja sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang terpilih bersama memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

- d. Kepala Desa adalah pemimpin masyarakat, penyelenggara urusan Pemerintah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan istirahat setempat.
- e. Badan Permusyawaratan Desa merupakan perubahan nama dari Lembaga Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal berbasis pada filosofi musyawarah untuk mufakat. musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari hasil proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang dapat merugikan masyarakat luas.
- f. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan.
- g. Pembangunan Desa adalah proses perubahan yang terus menerus dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat beserta pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin, materi dan spiritual berdasarkan Pancasila yang berlangsung di desa.
- h. Infrastruktur Pembangunan dalam sebuah sistem menjadi penopang kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu ruang. Infrastruktur merupakan wadah sekaligus katalisator dalam sebuah pembangunan. Ketersediaan

infrastruktur meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang menuju pada perkembangan ekonomi suatu kawasan atau wilayah. Oleh karenanya penting bagaimana sistem rekayasa dan manajemen infrastruktur dapat diarahkan untuk mendukung perkembangan ekonomi suatu kawasan wilayah.

D. Katagorinisasi

Kategorisasi merupakan proses intusif yang sistematis dan bernalar berdasarkan tujuan penelitian, orientasi dan pengetahuan peneliti, serta konstruk-konstruk yang dieksplisitkan oleh responden penelitian dalam Alwasilah (2002:236). Adapun katagorinisasi dari Efektivitas Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang adalah :

- a. Adanya tujuan.
- b. Adanya ketepatan waktu
- c. Adanya sarana dan prasarana .
- d. Adanya hasil

E. Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi dalam penelitian kualitatif, penelitian dengan melakukan wawancara yang terus terang artinya tidak sembunyi-bersembunyi. Narasumber mengerti benar tentang informasi apa yang ia berikan.

Menurut Moleong (2006:200) penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian non kualitatif, pada penelitiannya sample itu dipilih dari suatu populasi, sedangkan pada penelitian kualitatif, sample sangat erat kaitnya dengan faktor-faktor kontekstual. Jadi sampling dalam hal ini adalah untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam narasumber dan menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan teori yang muncul.

Narasumber dalam penelitian ini antara lain :

1. Kepala Desa Bakaran Batu

Nama : Tono Sutejo

Alamat : Jl. Utomo No.34 Dusun II Desa Bakaran Batu

Jabatan : Kepala Desa

2. Kaur Pembangunan Desa Bakaran Batu

Nama : M. Uspan

Alamat : Jl. Medan Batang Kuis Gg. Istiqomah No. 14 Dusun I
Desa Bakaran Batu

Jabatan : Kaur Pembangunan

3. Ketua BPD

Nama : Khazali Ahmad

Alamat : Jl. Payah Gambar, Perumahan Asri Blok E No.18

Jabatan : Ketua BPD

4. Anggota BPD

Nama : Budianto

Alamat : Jl. Medan Batang Kuis No. 7 Dusun I Desa Bakaran Batu

Jabatan : Serkertaris BPD

5. Anggota BPD

Nama : Suryadi

Alamat :Jl. Utomo Gg. Sekolah No. 43 Dusun III Desa Bakaran
Batu

Jabatan : Anggota BPD

6. Masyarakat Desa

Nama : Rosul Siregar

Alamat : Jl. Utomo Gg. Sekolah No.90 Dusun III Desa Bakaran
Batu

7. Masyarakat Desa

Nama : Kartika Sari

Alamat : Jl. Medan Batang Kuis Gg. Family No. 17 Dusun I Desa
Bakaran Batu

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini di klasifikasikan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik :

1. Data Primer

Data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan atau diperoleh secara langsung dilapangan atau ditempat penelitian melalui wawancara. Suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang didapatkan dari sumber data secara langsung melalui percakapan atau Tanya jawab, antara dua orang atau lebih, khususnya tentang Efektivitas Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Infrastrukrtur Desa Di Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah suatu teknik pengumpulan data lapangan dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, jurnal maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian di analisis kemudian dibandingkan dan di padukan membentuk suatu kajian yang sistematis, padu dan utuh.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta meningkatkan data sehingga mudah untuk membuat suatu deskripsi dari gejala yang diteliti. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif yaitu dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data yang terkumpul, mempelajari data yang tersedia, menelaah, menyusunnya dalam satu satuan, yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya dan memeriksa keabsahan data serta menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian (Moleong, 2006:247). Data yang disajikan berdasarkan fakta – fakta yang saling berkaitan yang dapat diambil, sehingga memberi gambaran yang jelas tentang Efektivitas Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang. Terdapat beberapa langkah dalam melakukan analisis data, yaitu :

1. Reduksi data

Reduksi data dilakukan dengan merangkum dan memfokuskan hal-hal yang penting tentang penelitian dengan mencari tema dengan pola hingga memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Bermakna sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk teks yang bersifat naratif, bagan, dan dalam bentuk tabel.

3. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

H. Lokasi dan Waktu Penelitian

Suatu penelitian sudah jelas harus memiliki lokasi yang nyata dan jelas, berfungsi untuk menghindari kekeliruan dan manipulasi suatu data penelitian tersebut. Lokasi penelitian merupakan tempat untuk meneliti dan mencari data yang akan dikumpulkan berguna untuk penelitian. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.

Adapun Waktu Penelitian dilakukan pada hari yang berbeda, dikarenakan sudah melakukan beberapa kali penelitian ke lapangan, penelitian pertama kali dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2016, melakukan proses wawancara ke kantor desa dan masyarakat, Adapun penelitian selanjutnya akan dilanjutkan sampai dengan selesai.

I. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah

Desa Bakaran Batu adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang yang memiliki 3 Dusun yang luasnya hanya 45 Ha. Menurut beberapa tokoh masyarakat dan para orang tua Yang mengetahui asal usul Desa Bakaran Batu, bahwa dahulunya Desa Bakaran Batu bernama Kampung Raja. Pada masa kekuasaan kesultanan/kerajaan serdang dan masih pada zaman penjajah belanda, dikampung raja tersebut terdapat kerajinan pembuatan batu bata oleh pengusaha etnis Tionghoa. Dan pada masa itu produksi batu bata tergolong cukup besar dan susah terkenal di suluruh pelosok sekitar wilayah sultan serdang. Lambat laun orang menyebutnya dengan kampung Bakaran Batu. Dan sampai saat ini dikenal dengan nama Desa Bakaran Batu.

2. Geografis

Desa Bakaran Batu terletak dalam wilayah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang berbatas dengan :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Binang Meriah dan Desa Sei Rotan Kecamatan Batang Kuis
2. Sebelah timur berbatasan dengan desa Binttang Meriah Kecmatan Batang Kuis.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan dengan kelurahan/desa Kecamatan Sena Kabupaten Deli Serdang
4. Sebelah barat berbatasan dengan Percut Sei Rotan Kabupaten Deli Serdang.

Luas wilayah Desa Bakaran Batu adalah 45 Ha. Dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk perawahan tadah hujan. Iklim Desa Bakaran Batu sebagaimana desa yang lainnya Indonesia mempunyai pengaruh langsung terhadap pola di tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Bakaran Batu.

Berikut merupakan infrastruktur yang sudah ada saat ini di Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang .

Tabel III.1 Sarana dan Prasarana Desa

Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah
Balai Desa	1 Unit
Kantor Desa	1 Unit
Puskesmas	1 Unit
Masjid	2 Unit
Pos kamling	3 Unit
Taman Kanak-kanak	1 Unit
SD Negeri	1 Unit
Madrasah Tsanawiyah	1 Unit
Madrasah Diniyah Awaliyah	1 Unit
Tower Seluler	2 Unit
Jembatan Sungai	2 Unit
Toilet Umum	4 Unit
Lapangan Bola Kaki	1 Unit
Lapangan Bola Voli	1 Unit
Lapangan Bulu Tangkis	1 Unit
Jalan Aspal Penetrasi	

Sumber : *RPJM Desa Bakaran Batu 2010-2015*

3. Demografis

Penduduk desa Bakaran Batu berasal dari berbagai daerah yang berbeda – beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari provinsi Jawa Tengah, Tapanuli Selatan dan Melayu Deli sehingga tradisi – tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Bakaran Batu dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan – benturan antar kelompok masyarakat.

Desa Bakaran Batu mempunyai jumlah penduduk 3287 jiwa yang terdiri dari laki laki 1645 jiwa dan perempuan 1642 jiwa 727 Kepala Keluarga, yang terdiri dalam 3 (tiga) wilayah dusun.

4. Visi dan Misi

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan misi Desa Bakaran Batu ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif melibatkan pihak – pihak yang berkepentingan di Desa Bakaran Batu seperti Pemerintah Desa BPD Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Desa dan Masyarakat Desa pada umumnya. Dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal di desa sebagai satu satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan, maka Visi Desa Bakaran Batu adalah : “MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN, PENDIDIKAN, KESEHATAN, DALAM MEMBENTUK MASYARAKAT DINAMIS YANG BERMARTABAT DAN RELIGIUS”

b. Misi

Selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi – misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya Visi desa tersebut Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian

dijabarkan ke dalam Misi agar dapat di oprasionalkan/ dikerjakan. Adapun

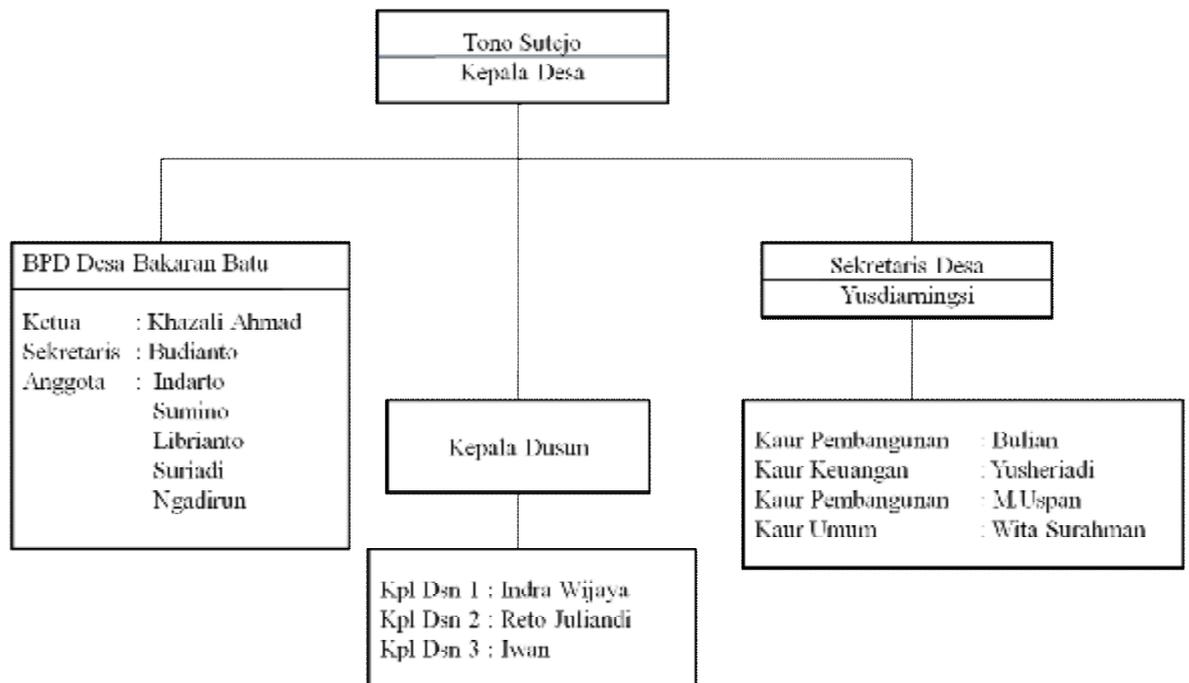
Misi Desa Bakaran Batu adalah :

1. Mengembangkan dan meningkatkan masyarakat berpotensi sumber daya.
2. Pembuatan kantor desa defenitif dan permanen.
3. Peningkatan sarana air bersih bagimasyarakat.
4. Perbaikan dan peningkatan layanan sarana kesehatan dan umum.
5. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
6. Meningkatkan keerampilan dan kualitas SDM masyarakat.
7. Pengadaan permodalan untuk usaha kecil, memperluas lapangan kerja dan manajemen usaha masyarakat.
8. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa dan BPD.Peningkatan sarana dan prasarana kerja Perangkat Desa BPD.

Adapun struktur Pemerintahan Desa Bakaran Batu adalah sebagai berikut

Gambar III.2 Struktur Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis

Kabupaten Deli Serdang



Sumber : *RPJM Desa Bakaran Batu 2010-2015*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Narasumber

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber, selanjutnya dapat diperoleh data – dara yang berhubungan erat dengan karakteristik responden menurut karakter jenis kelamin, tingkat pendidikan jabatan atau pekerjaan, selain itu data primer penelitian yang didapat berdasarkan hasil dari jawaban – jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada narasumber terkait dengan efektivitas badan permusyawaratan desa dalam pembangunan infrastruktur di desa bakaran batu yang akan dianalisa secara objektif mendalam sebagai bentuk hasil dan pembahasan penelitian.

Karakteristik dan jawaban dari narasumber penelitian akan digunakan sebagai sumber pengumpulan data penelitian yang selanjutnya digunakan sebagai sumber pengumpulan data penelitian yang akan disajikan secara sistematis dan diuraikan pada ulasan – ulasan berikut ini.

1. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber berjenis kelamin laki – laki dan perempuan, seperti pada table IV.1 berikut.

Tabel IV.1

Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentasi
1	Laki – laki	6	85.72%
2	Perempuan	1	14.28%
Jumlah		7	100%

Sumber Data wawancara tahun 2017

Berdasarkan tabel IV.1 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari jenis kelamin laki – laki dengan frekuensi sebanyak 6 orang dengan perentase 85.72% , sedangkan sisanya 1 orang berasal dari responden perempuan dengan peresentasi 14.28%.

2. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan narasumber dikelompokkan menjadi dua klasifikasi di dalam dunia pendidikan yaitu SMA dan S1, pada tabel IV.2 berikut ini disajikan persentase untuk masing – masing dari klasifikasi tersebut.

Tabel IV.2

Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

No	pendidikan	Frekuensi	Persentasi
1	SMA	5	71.43%
2	S-1	2	28.57%
Jumlah		7	100%

Sumber Data wawancara tahun 2017

Berdasarkan tabel IV.2 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berpendidikan SMA dengan frekuensi sebanyak 5 orang dengan presentase 71.43%, sedangkan sisa narasumber dengan tingkat pendidikan Stratal 2 orang dengan persentase 28.57%.

3. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan dari tingkat jabatan narasumber dari 7 narasumber masing - masing memiliki jabatan yang berbeda, pada tabel IV.3 akan diperlihatkan persentase katagori menurut jabatan yang dimiliki narasumber.

Tabel IV.3

Distribusi Narasumber Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Frekuensi	Persentase
1	Kepala Desa	1	14.28%
2	Kaur Pembangunan	1	14.28%
3	Ketua BPD	1	14.28%
4	Sekretaris BPD	1	14.28%
5	Anggota BPD	1	14.28%
6	Masyarakat	2	28.57%
Jumlah		7	100%

Sumber Data wawancara tahun 2017

Berdasarkan tabel IV.3 diatas dapat dilihat bahwa setiap narasumber memiliki 1 jabatan baik dari pemerintahan desa, BPD memiliki persentase 14.28% dan sisanya masyarakat sebanyak 2 orang yang memiliki persentase 28.57%.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di kantor Kepala Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang pada Kepala Desa, Kepala Urusan Pembangunan, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, 3 Anggota BPD dan 3 masyarakat pelaku pembangunan yaitu Bidang Pendidikan, Kepala Dusun II dan Tokoh Agama maka dapat dianalisa satu persatu tentang jawaban narasumber berdasarkan katagorisasi sehingga diperoleh data rekapitulasi sebagai berikut :

1. Adanya tujuan

Tercapainya tujuan dari pembangunan infrastuktur desa merupakan hal yang diinginkan setiap penyelenggara pemerintahan desa dan masyarakat desa. Suatu organisasi yang ideal seharusnya memiliki tujuan, tujuan inilah yang menjadi dasar kegiatan organisasi.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan organisasi desa yang dalam pembangunan infrastruktur desa bertujuan untuk membantu pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa, dimana manajemen dan tata kerja BPD dalam pembangunan infrastruktur melakukan pembahasan perancangan pembangunan, menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan berjalannya pembangunan infrastruktur desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Tono Sutejo selaku Kepala Desa Bakaran Batu pada tanggal 14 Februari 2017 menyatakan bahwa tugas dan fungsi BPD Desa Bakaran Batu dalam pembangunan

infrastruktur belum mencapai tujuan yang diharapkan, anggota BPD kurangnya memahami tupoksi sehingga anggota BPD tidak ikut berpartisipasi.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak M.Uspan selaku Kaur Pembangunan Desa Bakaran Batu pada tanggal 13 Februari 2017 menyatakan bahwa BPD Bakaran Batu sudah mencapai tujuannya yang diharapkan. Hal itu terbukti dengan BPD yang menampung dan menyerap aspirasi masyarakat desa yang kemudian membahasnya dalam rapat perencanaan dengan pemerintah desa sehingga pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Namun dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Khazali Ahmad selaku ketua BPD Bakaran Batu pada tanggal 16 Februari 2017 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terutama dalam pembangunan infrastruktur belum mencapai tujuannya, dikarenakan permasalahan anggaran yang tidak mencukupi, sehingga aspirasi masyarakat sampai saat ini belum tersalurkan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepada Bapak Budianto selaku anggota BPD Bakaran Batu pada tanggal 15 Februari 2017 menyatakan bahwa tujuan BPD belum terpenuhi, adanya ketidaksejajaran antara BPD dengan Pemerintah Desa, BPD Desa Bakaran Batu hanya sebagai lembaga penyetuju, hal tersebut menyebabkan kurang efektifnya tugas dan fungsi sebenarnya dari BPD.

Hal yang sama juga dikemukakan Bapak Suriadi selaku anggota BPD Bakaran Batu pada tanggal 13 Februari 2017 menyatakan bahwa tugas dan

fungsi BPD belum terlaksana secara maksimal, Desa Bakaran Batu merupakan desa kecil, sehingga dalam menjalankan tugasnya hanya dilakukan oleh Ketua BPD.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rosul Siregar selaku masyarakat Desa Bakaran Batu pada tanggal 13 Februari 2017 menyatakan bahwa tugas dan fungsi BPD Bakaran Batu dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa belum mencapai tujuan yang diharapkan. Karena minimnya pengetahuan BPD mengenai tugas dan fungsinya sebagai lembaga perwakilan dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan BPD di desa.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Kartikasari selaku masyarakat Desa Bakaran Batu pada tanggal 15 Februari 2017 menyatakan bahwa tugas dan fungsi BPD Bakaran Batu dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa belum mencapai tujuan yang diharapkan. Kerena adanya kesibukan diluar dari tugas BPD sehingga BPD tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perwakilan desa dengan optimal”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan seluruh narasumber maka disimpulkan bahwa tujuan BPD dalam pembangunan infrastruktur desa belum mencapai hasil yang maksimal, hal itu dikarenakan kurangnya pengetahuan anggota BPD dan masyarakat desa terhadap tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan desa dan kurangnya anggaran sehingga belum terealisasikannya aspirasi masyarakat, dan adanya kesenjangan antara Kepala Desa sebagai pelaksana Pemerintahan Desa dengan BPD yang

menyebabkan kurang maksimalnya BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

2. Adanya ketepatan waktu

Ketepatan waktu dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa sangat di pengaruhi kinerja dari penyelenggara pemerintahan desa. Ketepatan waktu merupakan suatu bukti bahwa pekerjaan telah selesai dilakukan sesuai waktu yang ditentukan.

Sebagaimana Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Tono Sutejo selaku Kepala Desa Bakaran Batu pada tanggal 14 Februari 2017 menyatakan bahwa ketepatan waktu dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa sudah diselesaikan tepat pada waktunya. pembangunan langsung dilaksanakan apabila anggaran sudah disalurkan.

Hal serupa juga disampaikan Bapak M. Uspan selaku Kaur Pembangunan Desa Bakaran Batu pada tanggal 13 Februari 2017 menyatakan bahwa ketepatan waktu dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa sudah diselesaikan tepat pada waktunya. Selama ini pembangunan selalu berjalan lancar tanpa adanya hambatan yang terlalu berat misalnya masalah cuaca yang buruk namun proses pembangunan harus tetap dilaksanakan secepat mungkin agar tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan.

Hasil wawancara kepada Bapak Khazali Ahmad selaku Ketua BPD Bakaran Batu pada tanggal 16 Februari 2017, menyatakan bahwa Ketepatan waktu dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa sudah tepat waktu.

Namun masih ada pembangunan yang belum terlaksana karena keterbatasan anggaran dan masalah lahan masyarakat yang tidak diizinkan untuk pembangunan desa, namun tidak serta merta memberhentikan proses jalannya pembangunan.

Menurut Bapak Budianto dan Bapak Suriadi selaku anggota BPD Bakaran Batu menyatakan bahwa ketepatan waktu dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa sudah diselesaikan tepat pada waktunya. Apabila ada kendala dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa BPD bersama dengan Pemerintahan Desa melakukan musyawarah untuk mencari solusi sehingga pembangunan desa diselesaikan tanpa melewati waktu yang telah ditentukan.

Selain itu wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rosul Siregar selaku masyarakat Desa Bakaran Batu pada tanggal 13 Februari 2017, menyatakan bahwa ketepatan waktu dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa sudah diselesaikan tepat pada waktunya. Namun masih ada pembangunan yang tidak merata dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat seperti tidak memberikan izin lahan miliknya untuk dijadikan pembangunan terutama pembangunan jalan.

Hal yang sama juga dikemukakan Ibu Kartikasari selaku masyarakat Desa Bakaran Batu pada tanggal 15 Februari 2017 yang menyatakan ketepatan waktu dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa sudah diselesaikan tepat pada waktunya. Adapun kendala yang dihadapi BPD mengenai ketepatan waktu pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa karena

tidak cukupnya anggaran yang tersedia sehingga pembangunan infrastuktur desa belum semua terlaksana.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan seluruh narasumber maka disimpulkan bahwa ketepatan waktu pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang ada saat ini sudah cukup baik dari waktu pelaksanaan program hingga berakhirnya program sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, meskipun terdapat kendala seperti cuaca, kurangnya anggaran dan lahan pembangunan, namun pembangunan tetap berjalan dengan semestinya.

3. Adanya sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana pada Badan Permusyawaratan Desa merupakan segala macam kebutuhan untuk membantu dan memudahkan BPD pada saat melaksanakan pekerjaannya.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Tono Sutejo selaku Kepala Desa Bakaran Batu dan Bapak M. Uspan selaku Kaur Pembangunan Desa Bakaran Batu menyatakan bahwa sarana dan prasarana untuk BPD dalam pelaksanaan pembangunan infrastuktur desa tidak memadai, dikarenakan kurangnya anggaran, selama ini anggaran yang tersedia lebih memprioritaskan untuk pembangunan desa untuk memajukan Desa Bakaran Batu”.

Menurut Bapak Khazali Ahmad selaku ketua BPD Bakaran Batu pada tanggal 16 Februari 2017 yang meanyatakan bahwa sarana dan prasarana untuk

BPD dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa tidak memadai. Hal tersebut menjadi dampak keefektifan BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya selain itu masalah kerbatasan anggaran juga menjadi faktor tidak terpenuhinya sarana dan prasarana untuk BPD anggaran yang tersedia lebih memprioritaskan untuk pembangunan desa.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Budianto dan Bapak Suriadi selaku anggota BPD Bakaran Batu yang menyatakan bahwa sarana dan prasarana untuk BPD dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa tidak memadai. Sehingga BPD tidak tau apa yang mau dikerjakan apalagi sebagian anggota BPD tidak mengetahui sepenuhnya tugas dan fungsi BPD dan baru satu tahun belakangan ini BPD mendapatkan biaya operasional.

Begitu juga hasil wawancara Bapak Rosul Siregar dan Ibu Kartikasari selaku masyarakat Desa Bakaran Batu yang menyatakan bahwa sarana dan prasarana untuk BPD dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa tidak memadai. Contohnya seperti ruangan khusus untuk BPD, alat administrasi belum ada sampai saat ini, dan tidak adanya pendapatan tetap serta biaya operasional dalam menunjang kegiatan BPD.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan seluruh narasumber maka disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPD Desa Bakaran Batu masih sangat terbatas dalam menunjang efektivitas BPD dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Sehingga kinerja BPD tidak bisa dilakukan dengan optimal.

4. Adanya hasil

Hasil kerja Badan Permusyawaratan Desa pada pelaksanaan kegiatan kerja BPD dalam membangun Infrastruktur desa adanya keberhasilan dalam merealisasikan aspirasi – aspirasi masyarakat yang diutarakan saat rapat dan berjalannya rancana – rencana yang telah di tetapkan dalam pembangunan desa, adanya hasil kerja BPD yang di rasakan masyarakat desa merupakan keberhasilan BPD dalam pencapaian pekerjaan yang dilaksanakan secara tepat, efektif, dan efisien apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan yang telah direncanakan.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Tono Sutejo selaku Kepala Desa Bakaran Batu pada tanggal 14 Februari 2017, yang menyatakan bahwa hasil kerja BPD Bakaran Batu dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa belum optimal. Karena BPD Bakaran Batu belum mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya hanya dikerjakan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa.

Namun menurut Bapak M. Uspan selaku Kaur Pembangunan Desa Bakaran Batu pada tanggal 13 Februari 2017, yang menyatakan bahwa hasil kerja BPD Bakaran Batu dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa sudah optimal. Hal tersebut dibuktikan pada pembangunan infrastruktur desa dapat berjalan dengan baik mulai dari meyerap dan menampung aspirasi masyarakat desa kemudian menyusun program sampai pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa selalu melibatkan BPD.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Khazali Ahmad selaku ketua BPD Bakaran Batu pada tanggal 16 Februari 2017, yang menyatakan bahwa hasil kerja BPD Bakaran Batu dalam pelaksanaan pembangunan infrastuktur desa belum optimal. Karena belum meratanya pelaksanaan pembangunan infrastuktur Desa Bakran Batu disebabkan anggaran yang tidak mencukupi sehingga aspirasi masyarakat tidak semua tersalurkan.

Hal yang sama dikemukakan oleh Bapak Budianto selaku anggota BPD pada tanggal 15 Februari 2017, yang menyatakan bahwa hasil kerja BPD Bakaran Batu dalam pelaksanaan pembangunan infrastuktur desa belum optimal. Karena tugas BPD hanya sebagai lembaga penyetujui setiap keputusan dalam rapat.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Suriadi selaku anggota BPD Bakaran Batu pada tanggal 13 Februari 2017, yang menyatakan bahwa hasil kerja BPD Bakaran Batu dalam pelaksanaan pembangunan infrastuktur desa belum optimal. Karena BPD Bakaran Batu belum menjalankan fungsi dan tugasnya seperti menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, mengawasi serta meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa. Sebab tidak mendukungnya sarana dan prasarana untuk BPD untuk memudahkan tugas dan fungsinya.

Selain itu hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Rosul Siregar selaku masyarakat Desa Bakaran Batu pada tanggal 13 Februari 2017, yang menyatakan bahwa hasil kerja BPD Bakaran Batu dalam pelaksanaan

pembangunan infrastuktur desa belum optimal. Karena tidak meratanya pembangunan Desa Bakaran Batu.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ibu Kartikasari selaku mayarakat Desa Bakaran Batu pada tanggal 15 Februari 2017 mengatakan hasil kerja BPD Bakaran Batu dalam pelaksanaan pembangunan infrastuktur desa belum optimal. Karena, tugas BPD sampai saat ini hanya sebagai penyetuju dari segala hasil yang telah ditetapkan kepala desa setiap diadakannya rapat di kantor Desa mengenai tugas yang lainnya seperti melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa sampai saat ini belum terlaksana.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan seluruh narasumber maka disimpulkan bahwa ketidakaktifan anggota BPD dan ketidakpahaman BPD terhadap tugas dan fungsinya serta kurangnya fasilitas sarana dan prasarana mengakibatkan kurang maksimalnya peran BPD dalam pembangunan infrastuktur di desa sehingga sebagian masyarakat belum merasakan manfaat dari adanya BPD.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dan dilaksanakan oleh penulis dilapangan, maka penyajian satu persatu tentang jawaban narasumber sehingga diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut.

1. Adanya Tujuan

Tingkat efektivitas organisasi menunjukkan pada tingkat jauh organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber-sumber yang ada.

Efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan. Seperti yang dikemukakan oleh Martoyo (2002 : 4) mendefinisikan efektivitas kerja adalah sebagai suatu kondisi atau keadaan dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana dan peralatan yang digunakan, disertai dengan kemampuan yang dimiliki, adalah tepat sehingga tujuan yang dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. efektivitas selalu dikaitkan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai.

Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa adanya tujuan merupakan suatu hal yang ingin dicapai untuk menunjukkan tingkat efektivitas sejauh mana fungsi dan tugas dilaksanakan. Pelaksanaan fungsi dan tugas BPD pada dasarnya mengacu pada tugas dan fungsi dari lembaga ini yang sudah diatur dalam peraturan Undang – undangan No. 6 Tahun 2014 yaitu melaksanakan legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta fungsi pengawasan.

Namun dalam pelaksanaannya, Jika dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti bahwa pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa

Bakaran Batu dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya terutama dalam pembangunan infrastruktur di Desa Bakaran Batu, BPD hanya sebagai lembaga organisasi yang membahas dan mengajukan usul perencanaan pembangunan, akibatnya tujuan BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perwakilan masyarakat dan melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa belum mencapai tujuan yang di harapkan

Dapat disimpulkan bahwa tujuan BPD Desa Bakaran Batu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa hanya sebagai lembaga organisasi yang membahas dan mengajukan usul perencanaan pembangunan hal tersebut menunjukkan bahwa kurang efektifnya tugas dan fungsi dari BPD.

2. Adanya Ketepatan Waktu.

Waktu adalah suatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi tapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi. Hasibuan (2005 : 63) mendefinisikan efektivitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Artinya apakah pelaksanaan suatu nilai baik atau tidak tergantung apabila tugas diselesaikan, bagaimana cara melaksanakan dan berapa biaya yang dikeluarkan.

Hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti bahwa ketepatan waktu BPD dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketepatan waktu yang telah ditentukan. Dilihat dari pembangunan infrastruktur Desa Bakaran Batu yang dilaksanakan tepat pada waktunya meskipun dalam proses pembanguana infrastuktur terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran dan lahan masyarakat yang tidak diberikan izin untuk pembangunan.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Bakaran Batu sudah berjalan tepat waktu. ketepatan waktu sudah cukup baik dari waktu pelaksanaan program hingga berakhirnya prgram sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Meskipun terdapat kendala seperti kurangnya anggaran serta masih banyaknya masyarakat yang tidak mengizinkan lahannya digunakan dalam pembangunan, kondisi ini dipengaruhi oleh kurangnya kordinasi yang dilakukan Pemerintah Desa dan juga BPD Desa Bakaran Batu dalam menggerakkan masyarakat desa berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur desa.

3. Adanya Sarana dan Prasarana

Dalam dunia birokrasi, pemberian fasilitas baik berupa dana, sarana dan alat bantu lainnya merupakan hal yang harus dilakukan. Fasilitas dalam bentuk fisik yakni memberikan sarana dan prasarana kepada BPD untuk memperlancar tugas pemerintahan dalam menuju pembangunan yang lebih

maju. Fasilitas tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi BPD untuk mendorong mereka dalam menjalankan tugasnya secara lancar. Seperti yang dikemukakan Siagian (2001 : 24) mendefinisikan efektivitas kerja adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti bahwa sarana dan prasarana untuk BPD di Besa Bakaran Batu saat ini belum memadai melihat dari kondisi dana yang tidak cukup mengakibatkan belum terpenuhinya sarana dan prasarana untuk BPD seperti: ruang kantor khusus untuk BPD yang memadai, alat – alat perlengkapan administrasi, biaya operasional yang dibutuhkan BPD. Dana yang tersedia lebih diprioritaskan pada pembangunan untuk masyarakat, hal tersebut menjadi kendala BPD dalam melakukan tugas dan fungsinya.

Dalam pasal 61 Undang – undang No. 6 Tahun 2014 tentang hak dan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa.
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Dari pasal 61 Undang – undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Badan Permusyawaratan Desa berhak mendapatkan biaya operasional sebagai penunjuang dalam menjalankan tugasnya.

Dapat disimpulkan bahwa tidak mendukungnya sarana dan prasarana untuk BPD Desa Bakaran Batu menjadi salah satu faktor ketidakefektivan BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, fasilitas sarana dan prasarana untuk BPD tidak dimiliki sama sekali, hal ini menjadi kendala yang harus dihadapi oleh BPD Bakaran Batu . Tidak adanya sarana dan prasarana disebabkan tidak adanya dana anggaran ataupun fasilitator untuk kebutuhan BPD Desa Bakaran Batu. Tidak adanya pemberian pendapatan menjadi faktor yang berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas kerja Badan Permusyawaratan Desa Bakaran Batu, hal ini mempengaruhi kinerja mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga BPD tidak memehui tugas dan fungsinya, yang mengakibatkan kurangnya pelayanan publik yang dilakukan BPD kepada masyarakat dan berdampak pada pembangunan infrastruktur desa.

4. Adaya Hasil

Efektif tidaknya suatu pekerjaan dibuktikan dengan adanya keberhasilan kegiatan manajemen yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu Badan Permusyawaratan Desa Bakaran Batu sebagai organisasi desa harus menyampaikan ide – ide, saran dan aspirasi

masyarakat agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat desa.

Seperti yang dikemukakan Anoraga (2000 : 178) mendefinisikan bahwa efektivitas kerja adalah berhubungan dengan pencapaian tujuan yang lebih dikaitkan dengan hasil kerja. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian hasil kerja yang maksimal dalam arti pencapaian dan target yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti bahwa hasil kerja yang dilakukan oleh BPD dalam pembangunan infrastruktur desa belum dirasakan oleh sebahagian masyarakat desa dari hasil kerja BPD selama 7 tahun ini BPD atau dengan adanya BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa, BPD belum melaksanakan tugasnya dengan baik seperti: mendengar dan menyalurkan aspirasi, melakukan pengawasan terhadap pelenyenggaran pemerintahan desa.

Pasal 63 Undang – undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa salah satu kewajiban BPD adalah menyerap, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa. Namun berdasarkan hasil penelitian di desa bakaran batu bahwasanya pembangunan infrastruktur sejauh ini belum merata, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BPD dalam menyerap aspirasi masyarakat desa, dan juga kurangnya menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa dan kurangnya pengawasan dalam mengawasi kinerja pemerintahan desa karena adanya ketidaksejajaran antara BPD dengan Pemerintahan desa, dominasinya

Kepala Desa selaku kepala pemerintahan desa dalam membuat peraturan perencanaan desa dan menjalankannya, yang menyebabkan ketikefektifan Badan Permusyawaratan Desa Bakaran Batu, seharusnya kedudukannya kepala desa selaku pemerintahan desa dengan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama – sama merupakan kelembagaan desa yang sejajar dengan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat.

Dapat disimpulkan bahwa hasil kerja BPD selama kurun waktu 7 tahun terutama dalam pembangunan infrastruktur belum bekerja secara maksimal, Baik dalam menampung aspirasi masyarakat desa, pembahasan perencanaan pembangunan, serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

D. Kendala – Kendala yang ditemui BPD Menjalankan Efektivitas Kerja BPD dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Bakaran Batu

Kurang Optimal dan kurang efektifnya suatu organisasi dalam pelaksanaan fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor atau kendala yang mempengaruhi kinerjanya dalam mencapai tujuan, seperti halnya dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bakaran Batu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kurangnya efektivitas kerja BPD. Berikut beberapa permasalahan mengenai tanggapan narasumber tentang kendala yang dihadapi BPD Desa Bakaran Batu dalam melaksanakan tupoksinya, diantaranya :

1. Kurangnya Pengetahuan BPD Desa Bakaran Batu Tentang Tugas dan Fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagai anggota lembaga, tentu dibutuhkan penguasaan dan pengetahuan yang baik mengenai lembaga tersebut. Begitu juga dalam hal ini, agar terwujud kinerja yang baik dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan pekerjaannya di pemerintah desa, dibutuhkan pengetahuan cukup dari para anggotanya mengenai fungsi, tugas, kewenangan, hak serta kewajiban yang harus dijalankan oleh anggota BPD, agar dapat menjalankan kerjanya sesuai dengan ketentuan Undang – Undang.

Hal itu membuktikan bahwa tidak adanya pembinaan yang dilakukan untuk anggota BPD menyebabkan ketidaktahuan dan ketidakpahaman tentang fungsi dan tugasnya, sehingga kurang maksimalnya efektivitas yang dapat mereka lakukan, mempersulit mereka dalam melakukan kerjasama dalam melakukan kordinasi dengan masyarakat.

2. Tidak Adanya Pendapatan dan Biaya Operasional untuk BPD Desa Bakaran Batu

Adanya pemberian gaji atau uang kehormatan menjadi faktor yang berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas kerja Badan Permusyawaratan Desa Bakaran Batu, hal tersebut merupakan wujud penghargaan dan kepedulian terhadap BPD.

Tidak adanya biaya operasional maupun pendapatan untuk BPD Bakaran Batu mempengaruhi kinerja mereka dalam menjalankan tugas dan

fungsinya sehingga membuat BPD lalai dari tugasnya, yang mengakibatkan kurangnya pelayanan publik yang dilakukan BPD kepada masyarakat dan juga dapat berimbas pada pembangunan infrastruktur desa.

3. Minimnya Sarana dan Prasarana Untuk BPD Desa Bakaran Batu

Dalam dunia birokrasi, pemberian fasilitas baik berupa dana, sarana dan alat bantu lainnya merupakan hal yang harus dilakukan. Fasilitas dalam bentuk fisik yakni memberikan sarana dan prasarana kepada BPD untuk memperlancar tugas pemerintahan dalam menuju pembangunan yang lebih maju.

Fasilitas tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi BPD untuk mendorong mereka dalam menjalankan tugasnya secara lancar. Hal ini tidak terlepas dari sarana dan prasarana sebagai penunjang, yakni adanya ruang kantor khusus untuk BPD yang memadai, alat – alat perlengkapan administrasi dan lain – lainnya yang dibutuhkan BPD.

minimnya sarana dan prasarana untuk BPD Desa Bakaran Batu menjadi salah satu yang berpengaruh kepada kinerja BPD dalam melaksanakan, hal ini menjadi kendala yang harus dihadapi oleh mereka. Tidak adanya sarana dan prasarana disebabkan tidak adanya dana anggaran ataupun fasilitator untuk kebutuhan BPD Desa Bakaran Batu.

4. Kurangnya Anggaran

Anggaran merupakan hal penting dalam pembangunan infrastruktur. Semakin cepat anggaran tersalurkan maka semakin cepat pula proses pembangunan berjalan, sebaliknya apabila kurangnya anggaran akan menyebabkan terhambatnya proses pembangunan.

Kurangnya anggaran pembangunan infrastruktur di Desa Bakaran Batu menyebabkan tidak tersalurkannya seluruh aspirasi masyarakat sehingga tidak meratanya pembangunan infrastruktur.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis data yang telah dijelaskan, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu pembangunan infrastruktur di desa bakaran batu berjalan dengan baik namun, efektivitas kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bakaran Batu dalam pembangunan infrastruktur menunjukkan hasil kerja yang kurang efektif dimana terlihat dari fungsi dan tugas yang BPD lakukan baik dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan perencanaan sampai proses pengawasan masih kurang. Hal tersebut terbukti dengan ketiadakaktifan anggota-anggota BPD tugas dan fungsi hanya dilakukan oleh Ketua BPD dan juga ketidaktahuan anggota BPD tentang fungsi dan tugasnya yang mengakibatkan kurang diikutsertakannya masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa.

2. Faktor – faktor yang menghambat efektivitas Badan Permusyawaratan Desa Bakaran Batu dalam pembangunan infrastruktur desa antara lain:

- a. .kurangnya pengetahuan BPD Bakaran Batu tentang fungsi dan tugasnya, anggota BPD tidak mengetahui fungsi dan tugas dari BPD.
- b. .tidak adanya pendapatan dan biaya oprasional untuk menunjang pelaksanaan kegiatan BPD di Desa Bakaran Batu.
- c. Minimnya sarana dan prasarana untuk BPD Desa Bakaran Batu.
- d. Kurangnya anggaran pembangunan infrastuktur di Desa Bakaran Batu menyebabkan tidak tersalurkannya seluruh aspirasi masyarakat sehingga tidak meratanya pembangunan infrastuktur.

B. Saran

1. Diberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan para anggota BPD dalam menjalankan fungsi dan perannya dengan mendatangkan ahli akademis ataupun mendatangkan ahli tata kelola pemerintah desa.
2. Diperlukan peran kecamatan untuk membantu meningkatkan kinerja BPD Desa Bakaran Batu dengan pemberian fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan BPD.
3. BPD harus memiliki rasa tanggung jawab yang lebih terhadap pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat sejak tahap perencanaan sampai ke tahap pelaksanaan pembangunan.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, A, Uhbiyati, N, 2001, *Ilmu pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Anoraga, Pandji. 2000. *Manajemen Bisnis*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsim, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta Jakarta.
- Alwasilah, A.C, 2002, *Pokoknya Kualitatif: Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. PT.Dunia Pustaka Jaya, Jakarta.
- Gie, The Liang, 2000, *Administrasi Perkantoran Modren*, Liberty Yogyakarta.
- Hasibuan Malayu S.P, 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Handoko, T. Hani, 2003, *Manajemen (edisi 2)*, BPFU UGM, Yogyakarta.
- Isbandi, Rukminto Adi, 2007, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas Dari Pemikiran Menuju Penerapan*, Fisip UI press, Depok.
- Kurniawan, Agung, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Pembaharuan, Yogyakarta.
- Kartasasmita, Ginandjar, 2001, *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, Pustaka CIDESINDO, Jakarta.
- Kodoatie, R.J, 2003, *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Komarudin. 2000. *Ensiklopedia Manajemen*. Edisi Kelima. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Moleong, Lexy, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rusda karya, Bandung.

- , 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya,
Bandung.
- Martoyo, Susilo. 2002. *Manajemen Sumber Daya manusia*. Edisi Kedelapan.
BPFE. Yogyakarta.
- Nurcholis Hanif , 2011, *Pertmbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa*, Erlangga, Jakarta
- Pabundu, 2010, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*,
PT.Bumi Aksara, Jakarta.
- Pasolong, Harbani.2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung , Alfabeta
- Suryono, Agus, 2001, *Teori dan Isu Pembangunan*, Un Press. Jakarta
- Siagian, P . Sondang 2001, *Manajemen Sumber Daya Personila dan
Manajemen Sumber Daya*, Bumi Aksara Jakarta.
- , 2002 : *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*.
Rineka Cipta, Jakarta.
- 2007, *Efektivitas Organisasi*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Suparno, A. Suhaenah, 2001, *Membangun Kompetensi Belajar*, Direktorat
Jendral Pendidikan Tinggi Derpartemen Pendidikan Nasional.
- Supriady, Deddy dan Riyadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. SUN,
Jakarta
- Sumaryandi, I Nyoman. 2005.*Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi
Daerah*, Citra Utama, Jakarta
- Saragi, Tumpal, 2004, *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa*, IRE
Press, Yogyakarta.

- Sugiarto, 2000, *Metodologi Penelitian dalam Bidang Kepariwisataaan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sutarto, 2008. *Dasar-dasar Organisasi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Steers Richard. M.. 2005. *Efektivitas Organisasi*. (Terjemahan). Erlangga, Jakarta
- Tampubolon, Biatna Dulbert, 2007, *Analisis Faktor Gaya Kepemimpinan Dan Faktor Etos Kerja Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Organisasi Yang Menerapkan SNI-19-9001-2001*, Jurnal Standarisasi Vol.9.No.3 Tahun 2007:106-115.
- Wasistiono, Sadu , dkk, 2006, *Prospek Pengembangan Desa*, Fokusmesia, Bandung.
- Yayuk, dkk, 2002, *Sosiologi Pedesaan*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta.

Undang – Undang

Undang –Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Permendagri No. 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 Tentang Desa.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. IDENTITAS

Nama : Ummi Kalsum Siregar
Tempat/tanggal Lahir : Medan, 25 November 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Utomo Gg.Sekolah No.90 Batang.Kuis
Jurusan : Administrasi Pembangunan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Anak ke : 2 dari 2 bersaudara

2. NAMA ORANG TUA

Ayah : Rosul Siregar
Ibu : Rosiana Harahap
Alamat : Jl. Utomo Gg.Sekolah No.90 Batang.Kuis

3. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 104230 Tahun 2006, Berizazah
2. SMP Negeri 1 Batang Kuis Tahun 2009, Berizazah
3. SMA SWASTA TELADAN MEDAN, Tahun 2012, Berizazah
4. Terdaftar sebagai mahasiswi FISIP UMSU Program Studi Ilmu Administrasi Negara konsentrasi Administrasi Pembangunan Tahun 2013 sampai sekarang.

Demikian daftar riwayat hidup ini diperbuat dengan sebenarnya.

Penulis

Ummi Kalsum Siregar